



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Mei 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : OKTO RUSDIANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI
3. NHK : 220007

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 479.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di JAKARTA TIMUR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 369.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/148 m2 di BEKASI , Rp.  
110.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 15.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL  
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL  
SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.090.671**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 512.590.671

**III. HUTANG** Rp. 20.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 492.590.671

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Juni 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.